

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan kawasan yang mempunyai kenampakan dan masalah yang kompleks. Kota tidak hanya berfungsi sebagai wadah dimana tempat beraglomerasinya penduduk dalam jumlah yang banyak, akan tetapi juga sebagai pusat berbagai kegiatan, seperti pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, transportasi, komunikasi dan jasa lainnya.

Sebagaimana pengertian kota menurut Bintarto (1979:9) bahwa:

”Suatu daerah dikatakan sebagai kota adalah bila daerah itu memiliki ciri-ciri kehidupan modern, penduduknya yang dinamis dan memiliki mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah pedesaan. Selain itu juga kota merupakan tempat pusat dari berbagai kegiatan manusia, sebagai pusat pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pendidikan, perdagangan, industri, pelayanan, dan jasa, pemerintahan dan lain-lain”.

Sejalan dengan waktu, kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kondisi fisik dan manusia yang ada di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan interaksi dinamis dari berbagai unsur pembentuk kota, seperti masyarakat dan kegiatan sosial ekonominya, lingkungan tempat tinggal, serta potensi-potensi yang terkandung di dalam lingkungan fisiknya. Unsur pembentuk kota pada hakikatnya merupakan suatu manifestasi tuntutan kebutuhan ruang dan interaksi antar kegiatan fungsional untuk kepentingan dan perkembangan masyarakatnya.

Pertumbuhan dan perkembangan kota tidak terlepas dari permasalahan kota sebagai dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan akan bangunan, ruang-ruang terbuka, sarana dan prasarana transportasi, utilitas serta sarana lainnya, yang akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk kota yang kian meningkat. Sementara di pihak lain, ruang kota tidak akan pernah bertambah. Adanya perkembangan tersebut, dipecahkan suatu daerah ke dalam bentuk kota dan kabupaten.

Pembentukan suatu pusat kota atau kabupaten merupakan hal yang penting untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dalam pembentukan suatu pusat pemerintahan daerah selalu berdasarkan pengamatan terhadap kondisi dan karakteristik wilayahnya itu sendiri. Berkaitan dengan itu, terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi yang tepat dan layak sebagai ibukota kabupaten. Karena menurut fungsinya kedudukan ibukota kabupaten bukan hanya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian saja, akan tetapi juga memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan di kecamatan-kecamatan sekitarnya yang ada di dalam wilayah administratif kabupaten tersebut.

Kota Majalengka yang berada di Kecamatan Majalengka merupakan Ibukota Kabupaten Majalengka yang dalam perjalanannya terus mengalami perkembangan. Kecamatan Majalengka terdiri dari 10 kelurahan dan 4 desa. Kecamatan Majalengka memiliki wilayah seluas 57 Km². Pertambahan penduduk di Kecamatan Majalengka setiap tahunnya memiliki peningkatan. Pertambahan

penduduk tersebut dapat dilihat pada tiap kelurahan dan desa pada periode tahun 1990 dan 2007 seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Majalengka Tahun 1990 dan 2007

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	
		1990	2007
1	Majalengka Kulon	8716	11106
2	Majalengka Wetan	7177	9712
3	Cicurug	4463	6058
4	Babakanjawa	2807	6563
5	Sindangkasih	3085	5406
6	Tonjong	1769	3832
7	Cikasarung	2606	2881
8	Tarikolot	1890	3325
9	Cijati	3515	4630
10	Munjul	1618	3856
11	Sidamukti	2995	3439
12	Cibodas	2527	3006
13	Kulur	3157	4021
14	Kawunggirang	1444	1593
Jumlah		47769	69428

Sumber: Monografi Desa Tahun 1990 dan 2007

Peningkatan angka pertumbuhan penduduk tersebut, tentunya dapat memberikan implikasi pada aspek fisik kota baik dari segi luas kotanya maupun fasilitas yang terdapat di suatu kota. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan Kota Majalengka dalam perjalanannya.

Dalam pengembangan sistem kota-kota dan sistem kegiatan pembangunan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka, disebutkan salah satunya adalah menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian utara, tengah dan selatan.

Berdasarkan landasan tersebut, Kecamatan Majalengka termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Tengah (WP Tengah), dengan fungsi utama sebagai kawasan pemerintahan, jasa, pelayanan sosial dan pengembangan perumahan.

Wilayah Pengembangan Tengah (WP Tengah) meliputi Kecamatan Majalengka, Cigasong, Leuwimunding, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sukahaji, dan Sindangwangi, dengan pusatnya di Kecamatan Majalengka.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut, dijelaskan bahwa Kecamatan Majalengka selain berperan sebagai ibukota pemerintahan juga merupakan suatu daerah yang memiliki hubungan fungsional terhadap daerah sekitarnya yaitu sebagai pusat pendorong pengembangan kegiatan pemerintahan, jasa, pelayanan sosial dan pengembangan perumahan. Terdapat beban yang menuntut Kecamatan Majalengka untuk berdiri sebagai kecamatan termaju dalam pemenuhan kebutuhan kota seperti kebutuhan akan bangunan, ruang-ruang terbuka, sarana dan prasarana transportasi, utilitas serta sarana lainnya, yang kian hari terus meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduknya.

Akan tetapi dijumpai di lapangan bahwa, suasana dan kondisi di Kecamatan Majalengka tampak lengang dan sepi, padahal Kecamatan Majalengka sebagai ibukota kabupaten seharusnya memiliki aktivitas kota dengan mobilitas yang tinggi. Adanya fenomena tersebut disinyalir akibat kurang tersedianya fasilitas-fasilitas sosial dan sarana umum. Serta faktor lokasi kecamatan yang sulit diakses dari daerah-daerah sekitarnya dengan alasan jarak dan sarana transportasi umum yang terbatas. Selain itu faktor letak membuat lokasi ibukota pemerintahan berada sangat jauh sekitar 12 Km dari jalur propinsi yang selalu ramai dengan aktivitas.

Kecamatan Majalengka memiliki peranan utama sebagai ibukota kabupaten yaitu sebagai suatu pusat yang secara aktif dan fungsional yang harus

dapat mendukung kegiatan-kegiatan wilayah kabupaten tidak hanya terbatas pada bidang administrasi pemerintahan saja, akan tetapi juga pada bidang ekonomi, sarana-prasarana, fasilitas pelayanan dan kebutuhan fisik lainnya serta memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan di kecamatan-kecamatan sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti Kecamatan Majalengka, terutama yang berkenaan dengan analisis perkembangan Kota Majalengka sebagai Ibukota Kabupaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan pada judul analisis perkembangan Kota Majalengka sebagai ibukota kabupaten. Adapun permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana perkembangan Kota Majalengka sejak tahun 1990 hingga tahun 2007?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Majalengka?
3. Apakah Kota Majalengka masih layak sebagai Ibukota Kabupaten Majalengka?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini diberikan judul “*Analisis Perkembangan Kota Majalengka Sebagai Ibukota Kabupaten*“, penulis ingin menganalisis mengenai perkembangan Kota Majalengka sebagai Ibukota Kabupaten Majalengka. Agar permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai lebih terarah, serta untuk menghindari kesalahpahaman, penulis menguraikan definisi operasional mengenai konsep-konsep yang terdapat pada judul penelitian sebagai berikut:

- 1). Analisis adalah penelaahan atau penguraian atas data sehingga menghasilkan simpulan-simpulan.
- 2). Perkembangan memiliki arti yang sama dengan berkembang, yang berarti terbuka atau terbentang menjadi luas dan besar, sesuatu keadaan menjadi banyak, (Poerwadarminta, 2005:473).

Perkembangan wilayah merupakan suatu proses peningkatan wilayah dari kondisi yang lalu dan sekarang untuk mencapai kondisi yang akan datang yang kita inginkan.

Perkembangan dalam penelitian ini dikaji berdasarkan perkembangan penggunaan lahan, fasilitas sosial serta kondisi sosial ekonomi penduduk Kota Majalengka yang berada di Kecamatan Majalengka dari tahun 1990 hingga tahun 2007. Fasilitas yang diteliti meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perekonomian dan fasilitas transportasi. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang menjadi bahan kajian meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan dan kondisi permukiman.

- 3). Kota Majalengka yang berada di Kecamatan Majalengka yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Majalengka.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1). Mengidentifikasi perkembangan Kota Majalengka sejak tahun 1990 hingga tahun 2007.
- 2). Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Majalengka.
- 3). Menganalisis kelayakan Kota Majalengka sebagai ibukota kabupaten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

- 1). Diperoleh data mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Majalengka dari tahun 1990 hingga tahun 2007.
- 2). Bagi dunia pendidikan dapat memperkaya wawasan kegeografian terutama sebagai bahan pengajaran geografi pokok bahasan Desa dan Kota sub pokok bahasan interaksi kota.

- 3). Memberikan informasi kepada Pemerintah setempat dan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan perkembangan Kota Majalengka sebagai ibukota kabupaten.
- 4). Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

